

## ABSTRAK

Korupsi adalah kejahatan yang luar biasa dan sangat merugikan keuangan negara. Pemberantasan korupsi merupakan hal yang harus dilakukan untuk mengembalikan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Keberhasilan jaksa dalam pembuktian dan penuntutan tindak pidana korupsi akan mempermudah hakim dalam memberikan putusan yang baik dan adil dalam upaya pemberantasan korupsi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, mengkaji dan menganalisis mengenai implementasi kebijakan penuntutan, hambatan dalam implementasi kebijakan penuntutan, dan upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan teori-teori penegakan hukum dan teori kepastian hukum.

Hasil penelitian ini adalah : (1) implementasi kebijakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal dilakukan dengan pemeriksaan acara biasa, dengan menggunakan sistem pembuktian terbalik yang terbatas dan berimbang. Dalam praktik selama ini terhadap perkara tindak pidana korupsi telah digariskan agar terhadap terdakwa dilakukan tuntutan pidana tinggi, baik berupa pidana badan maupun denda, agar tuntutan tersebut dapat menimbulkan efek jera dan daya tangkal dan di samping itu terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan dituntut dan dirampas untuk negara. Jaksa penuntut umum diwajibkan melaksanakan tugasnya di bidang penuntutan sesuai dengan undang-undang, SOP, maupun petunjuk pimpinan; (2) hambatan dalam implementasi kebijakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum di Kejaksaan Negeri Kendal, antara lain adalah sumber daya manusia yang terbatas serta pola dan juga keterbatasan anggaran dalam penanganan perkara korupsi; (3) upaya penyelesaian untuk mengatasi hambatan dalam implementasi kebijakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Kendal, yakni dengan melakukan konsultasi kepada pimpinan dan melakukan penggalangan kepada pihak-pihak yang terkait.

Kata Kunci : Kebijakan, Penuntutan, Penegakan Hukum, dan Korupsi

## **ABSTRACT**

Corruption is an extraordinary crime and is very detrimental to the state's finances. The eradication of corruption is something that must be done to restore the state financial losses due to corruption. The success of prosecutors in the provision and prosecution of corruption will facilitate the judge in giving a good and fair decision in the effort to eradicate corruption.

The purpose of this study is to describe, review and analyze the implementation of prosecution policy, obstacles in the implementation of prosecution policy, and the settlement efforts to overcome obstacles by the public prosecutor in the context of law enforcement of corruption in the Kendal District Attorney.

This research uses sociological juridical approach, with analytical descriptive research specification. The data used in this study are primary and secondary data, obtained through interviews and literature study, which then analyzed qualitatively using theory of law enforcement and legal certainty theory.

The result of this research are: (1) implementation of prosecution policy by public prosecutor in the framework of law enforcement of corruption in Kendal District Attorney done by examination of ordinary event, by using reversed proof system which is limited and balanced. In the current practice of corruption cases has been laid down in order for the defendant to commit high criminal charges, both in the form of penalties and fines, so that the claim can cause deterrent effect and deterrent power and in addition to the evidence submitted to the court prosecuted and deprived for the country. The public prosecutor shall be required to perform his duties in the prosecution field in accordance with the law, SOP, or leadership instructions; (2) obstacles in the implementation of prosecution policy by public prosecutor in Kendal District Attorney, such as limited human resources and pattern and also budget constraints in handling corruption cases; (3) settlement efforts to overcome obstacles in the implementation of prosecution policy by public prosecutor in the framework of law enforcement of corruption in Kendal District Attorney, that is by doing consultation to leader and do raising to related parties.

Keywords : Policy, Prosecution, Law Enforcement, and Corruption